

**PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADHAWI TENTANG PARTISIPASI  
POLITIK SEORANG MUSLIM DALAM PEMERINTAHAN  
NON MUSLIM**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Hukum Tata Negara

Oleh

**A.ALDINO ROMADHON**

**NPM : 1221020065**

**Program Studi : HUKUM TATA NEGARA**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1440 H/2020 M**

**PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADHAWI TENTANG  
PARTISIPASI POLITIK SEORANG MUSLIM DALAM  
PEMERINTAHAN NON MUSLIM**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Hukum Tata  
Negara**

**Oleh :**

**A.Aldino Romadhon  
NPM : 1221020065**

**Progam Studi : Hukum Tata Negara**

**Pembimbing I : Dr.Maimun, S.H., M.A.**

**Pembimbing II : H.Rohmat, S.Ag., M.HI.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1440 H/2020 M**

## Abstrak

Umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad, disibukkan oleh sebuah diskursus perdebatan nilai-nilai yang membahas akan negara dan pemerintahan dimasa Nabi. Dikarenakan setiap ulama mempunyai landasan-landasan tersendiri untuk mengatakan bahwa Nabi telah mendirikan sebuah negara dan pemerintahan walaupun dari sebagian lagi juga ada yang menyanggah pernyataan tersebut.

Prihal inilah yang kemudian memicu berbagai reaksi yang lahir dikalangan sesama umat muslim dengan mengemukakan dalil-dalil yang sama-sama sejatinya adalah menjelaskan atas perjuangan Islam yang digagas sejak masa Nabi. Terlebih kembali ketika kita akan berbicara terkait dengan sebuah kondisi sosial masyarakat muslim sepeninggalan Nabi, yang secara psikis sedang mengalami kegundahan akan sumber ilmu yang fundamental, dan dilain sisi kehilangan arah akibat perbedaan yang semakin santar dalam kalangan ulama dan sahabat. Dengan kurun waktu tersebut maka akan muncul dan lahir kembali gagasan-gagasan yang kadarnya mengakomodir berbagai pendapat ulama terdahulu. Yusuf Qaradhawi misalnya, yang menerangkan berbagai aspek terkait konteks Islam, negara, bangsa dan tata atur dalam kehidupan masyarakat (hubungan). Kesamaan dalam hidup bersama dalam sebuah wadah yang dinamakan negara, seperti yang telah disyariatkan oleh baginda Nabi Muhammad dan dilanjutkan oleh Sahabat dan ulama-ulama setelahnya.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang telah di jelaskan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah: Bagaimana pendapat atau pemikiran Yusuf al-Qaradhawi tentang partisipasi seorang muslim dalam pemerintahan non-muslim dan Apa dasar-dasar Hukumnya Yusuf al-Qaradhawi Memperbolehkan partisipasi seorang muslim dalam pemerintahan non-muslim

Dalam menjelaskan secara rinci tentang struktural dalam penelitian ini, penulis mengangkat sebuah metodologi yang sifatnya kualitatif dengan menjelaskan secara rinci keterkaitan antara sumber satu dengan sumber-sumber yang lainya dengan pola mendeskripsikan berbagai aspek yang tidak boleh dilewatkan. Menyelaraskan metode dengan studi pustaka (*librery research*) dan menjadikan *life history* sebagai konsepsi dalam melakukan penelitian pustaka ini.

Berdasarkan pembahasan di atas maka yang dapat disimpulkan pandangan Yusuf al-Qaradhawi tentang partisipasi politik seorang muslim dalam pemerintahan non muslim bahwa kehadiran seorang muslim harus dilaksanakan dalam bingkai tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat sebagai pelaksanaan dari ketaatan kepada pemimpin atau uliamri

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : A. Aldino Romadhon

NPM : 1221022065

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang berjudul “**PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADHAWI TENTANG PARTISIPASI POLITIK SEORANG MUSLIM DALAM PEMERINTAHAN NON MUSLIM**”, adalah benar-benar merupakan hasil karya penusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, Desember 2020



**A.Aldino Romadhon**  
**NPM. 1221020065**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung, 35131. Telp. (0721) 109260*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADHAWI  
TENTANG PARTISIPASI POLITIK  
SESEORANG MUSLIM DALAM  
PEMERINTAHAN NON MUSLIM**

**Nama : A.Aldino Romadhon**

**NPM : 1221020065**

**Jurusan : Hukum Tata Negara**

**Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqasah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Maimun, S.H., M.A.**

**NIP. 196003291987031003**

**H. Rohmat, S.Ag., M.HI.**

**NIP. 197409202003121003**

**Ketua Jurusan**

**Frenki, S.E.I., M.Si.**

**NIP. 198003152009011002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung, 35131. Telp. (0721) 109260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : **PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADHAWI  
TENTANG PARTISIPASI POLITIK SEORANG MUSLIM  
DALAM PEMERINTAHAN NON MUSLIM** oleh **A.Aldino  
Romadhon**, NPM 1221020065, Jurusan Hukum Tata Negara,  
telah diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan  
Hukum UIN Raden Intan Lampung

**TIM PENGUJI**

**Ketua Sidang : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**

**Sekretaris Sidang : Dani Amran Hakim, S.H., M.H.**

**Penguji I : Dr. H. A.Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H.**

**Penguji II : Dr. Maimun, S.H., M.A.**

**Penguji III : H. Rohmat, S.Ag., M.HI.**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah**

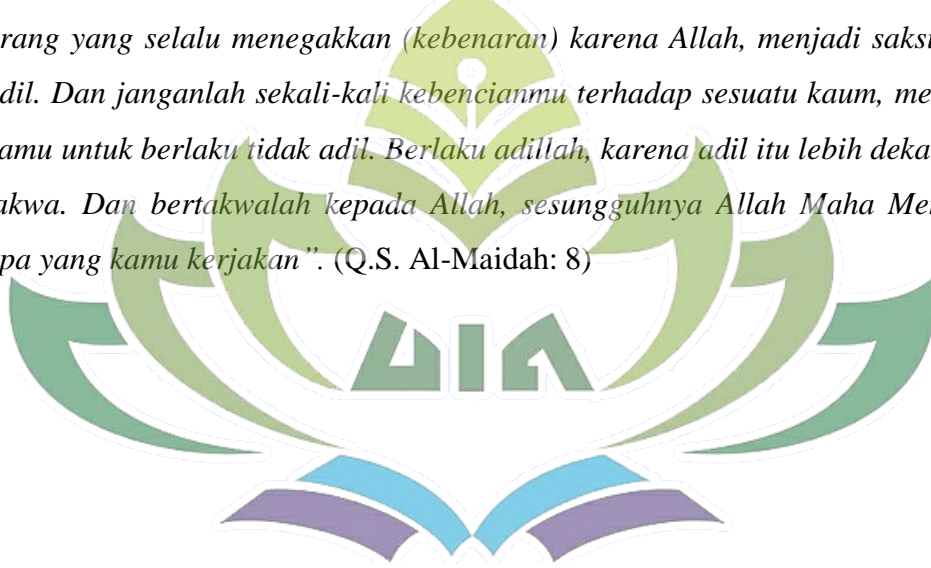
**Dr. H. Khairuddin, M.H.  
NIP. 196210221993031002**



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (*kebenaran*) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Maidah: 8)



## PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur kepada Allah *subhanawat'ala*, Skripsi ini saya persembakan untuk orang-orang yang mendukung penulis dalam menyelesaikan karya ini :

1. Kedua orang tuaku, Bambang Subardiono dan Nurhayati. yang senantiasa memberikan kasih sayang, motivasi, dan dukungan yang tiada henti serta mendoakan dan menuntun langkahku terselesaikan karya ini
2. Kakak sepupu Isti Arini, dan Adik sepupuku Arninda Rahman, yang menjadi salah satu motivasi dalam menyelesaikan karya ini
3. Para sahabat dan semua pihak yang telah membantu dalam memotivasi

Almamater yang tercinta universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung tercinta, Terima kasih kuucapkan atas keikhlasan dan ketulusan semuanya dalam mencurahkan kasih sayang dan doanya untukku, semoga amal dan kebaikan kalian di terima Allah SWT.



## RIWAYAT HIDUP

Penulis Bernama A. Aldino Romadhon di lahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 2 Maret 1993, Anak Pertama dari pasangan Bambang Subardiono dan Nurhayati.

Penulis memulai pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Gedong Air pada tahun 1998 sampai dengan 2004, Kemudian melanjutkan ke jenjang menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2007, setelah menyelesaikan pendidikan tingkat pertama penulis melanjutkan ke jenjang menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2010, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Fakultas Syariah tepatnya di jurusan Hukum Tata Negara yang di mulai pada semester 1 Tahun Akademik 2012/2013

Bandar Lampung, Desember 2020  
Penulis

**A.Aldino Romadhon**

NPM.1221022065

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT. Atas karunia dan nikmat-Nya yang di berikan kepada kita, Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADHAWI TENTANG PARTISIPASI POLITIK SEORANG MUSLIM DALAM PEMERINTAH NON MUSLIM”**

Sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah banyak membantu baik dalam bimbingan dan saran yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, iringan do'a dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri M.Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberi kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang selalu tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Frengki. S.E.I., M.Si, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara yang telah memfasilitasi segala kepentingan mahasiswa.
4. Bapak Dr. Maimun, S.H., M.A. dan H. Rohmat, S.Ag., M.HI. masing-masing selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan

waktu disela-sela kesibukan, serta memberikan bimbingan, arahan dan motivasi penulis sehingga skripsi ini selesai

5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk di bangku kuliah hingga selesai
6. Kedua Orang tua yang telah memberikan Doa dan Dukungan selama proses pembuatan skripsi
7. Teman Teman Muhammad Abdul Baqi, Muhammad Ari, Dicka Widyan Pratama, Ferdi May Safei, dan Azis Pratama dan teman-teman saya yang selalu memberikan motivasi
8. Teman Seperjuangan HTN terkhusus kelas A. semoga selalu di lancarkan segala urusannya

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Tata Negara.

Bandar Lampung, Desember 2020  
Penulis,

**A.Aldino Romadhon**

**NPM. 1221020065**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
PERSETUJUAN .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
PERNYATAAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi

## BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah .....	4
D. Fokus Penelitian .....	8
E. Rumusan Masalah .....	8
F. Tujuan Penelitian .....	9
G. Signifikan Penelitian .....	9
H. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	11
2. Sumber Data .....	11
3. Tehnik Pengumpulan Data .....	13
4. Tehnik Analisa Data .....	14

## BAB II SISTEM PEMERINTAHAN DALAM ISLAM

A. Negara dalam Kajian Islam .....	16
B. Pengertian Sistem Pemerintahan .....	20
C. Sistem Pemerintahan dalam Islam .....	27
D. Tugas dan Tujuan Pemerintahan .....	32
E. Fungsi Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif .....	38
F. Tinjauan Pustaka .....	49

### **BAB III DESKRIPSI PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI TENTANG PARTISIPASI POLITIK SEORANG MUSLIM DALAM PEMERINTAHAN NON-MUSLIM**

A. Biografi Yusuf al-Qaradhawi .....	52
1. Riwayat Hidup .....	52
2. Pendidikan Yusuf Qaradhawi .....	52
3. Kondisi Sosial Politik .....	54
4. Kegiatan Intelektualistas dan Karya-karyanya .....	54
B. Pemikiran Yusuf Qaradhawi Tentang Partisipasi Seorang Muslim dalam Pemerintahan Non Muslim .....	56
1. Keunikan Pemikiran Yusuf Qaradhawi .....	56
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Berangkat dari Berbagai Aspek Kehidupan .....	63
3. Partisipasi Seorang Muslim dalam Pemerintahan Non-Muslim .....	66

### **BAB IV ANALISIS**

A. Pendapat Yusuf Qaradhawi tentang Partisipasi Seorang Muslim dalam Pemerintahan Non Muslim .....	85
B. Dasar-dasar Hukum Yusuf Qaradhawi memperbolehkan Partisipasi Seorang Muslim dalam Pemerintahan Non Muslim .....	87

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	92
B. Rekomendasi .....	92

### **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Guna memperjelas pokok persepsi pembahasan dalam menjabarkan berbagai keterkaitan di dalam penelitian ini, maka dipandang perlu penjelasan judul dengan makna atau definisi yang terbangun dalam kandungan kandungan karya ilmiah ini. Adapun dari judul dari karya ilmiah ini ialah : **"PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADHAWI TENTANG PARTISIPASI POLITIK SESEORANG MUSLIM DALAM PEMERINTAHAN NON-MUSLIM".**

Kendatipun demikian dirasa masih terdapat hal-hal yang perlu dijabarkan secara terinci terkait dengan judul tersebut, yang diantaranya

1. **Pemikiran** ialah sebuah daya yang dimiliki oleh seseorang yang dimana dikiaskan berdiri dalam gelap, yang dimana sehingga orang yang ada tidak mengetahui apa yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Mereka yang tidak dipahami oleh orang lain dan lingkungannya, yang menangkapnya dalam gelap<sup>1</sup>. Meletakkan dasar pemikiran yang saling berhubungan dan merupakan pengetahuan yang diperoleh oleh manusia. adapun segala pengetahuan adalah sesuatu yang diperoleh dengan konsep, gagasan atau pemikiran yang telah lahir dan diperoleh manusia. kemudian berfikir merupakan pola yang dinamis yang menempuh tiga tahapan berfikir

---

<sup>1</sup> Andrea Hirata, dalam <https://jagokata.com/arti-kata/pemikiran.html>



dengan pembentukan pengertian, pembentukan pendapat dan pembentukan keputusan<sup>2</sup>.

2. **Yusuf Qaradhawi** salah satu ulama kontemporer yang mashur dalam pemikiran-pemikiran terkait dengan konsep dan pola pembaharuan pemikiran Islam. Lahir disebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab pada 9 September 1926. Pada usia 10 tahun, ia telah menghafal Alquran. Setelah menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Qaradhawi kemudian melanjutkan studinya ke Universitas al-Azhar, fakultas Ushuluddin dan menyelesaikannya pada tahun 1952. Tapi gelar doktornya baru dia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi "*Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan*" (terj.), yang kemudian disempurnakan menjadi *Fiqh az-Zakat*. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern<sup>3</sup>.

3. **Partisipasi politik** secara etimologi partisipasi berasal dari bahasa latin, yaitu *pers* yang berarti bagian dan *capere* yang dimana ini mengambil intisari, atau secara transparan dapat kita pahami sebagai bentuk mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi politik adalah sebuah upaya mengambil kepesertaan atau bagian dalam tata atur perpolitikan suatu negara<sup>4</sup>. Partisipasi merupakan aspek penting dalam kehidupan berdemokrasi. Partisipasi politik ialah usaha yang terorganisir oleh para warga negara untuk memilih pemimpin-

<sup>2</sup> Soemanto, dalam <http://digilib.unila.ac.id/1689/8/BAB%20II.pdf>, 2016, h. 31

<sup>3</sup> Yusuf al-Qardhawi” dalam [www.wikipedia.or.id](http://www.wikipedia.or.id), diakses pada tanggal 19 Agustus 2019

<sup>4</sup> Soeharno, *Diktat Kuliah Sosisologi Politik*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta), 2004, h. 102

pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk serta jalan kebijakan secara umum.

4. **Muslim dan non-muslim** hal ini merupakan sebuah konteks tentang tata aturan kepercayaan dan keimanan seseorang terhadap eksistensi Tuhannya masing-masing. Yang jelas dari ajaran Islam, kalimat muslim ialah orang yang berada di dalam jalur ajaran dan aqidah serta ketauhidan Islam. Sedangkan non-muslim ialah di luar apa yang menjadi keyakinan dan keimanan seorang Muslim. Prinsip hubungan muslim dengan orang lain dijelaskan Allah Swt dalam Al Qur'an dan melalui Utusan-Nya nabi Muhammad di mana harus terjalin atas dasar nilai persamaan, toleransi, keadilan, kemerdekaan, dan persaudaraan kemanusiaan (*al-ikhwah al-insaniyah*).

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang terdapat dalam judul di atas, maka dimaksud oleh judul skripsi ini adalah bagaimana pendapat Yusuf al-Qaradhawi tentang partisipasi politik seorang Muslim dalam Pemerintahan non-Muslim

## B. Alasan Memilih judul

Beberapa alasan yang menjadi dasar dalam pemilihan judul “Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi tentang Partisipasi Politik Seorang Muslim dalam Pemerintahan non-Muslim” sebagai berikut;

### 1. Alasan Obyektif

Pola pemikiran Yusuf Qaradhawi sejalan dengan konsentrasi hubungan harmonis di antara warga bangsa dan khususnya terkait kehidupan

berpolitik muslim dalam masyarakat non-muslim perlu untuk dibahas. Ini dikarenakan hidup berdampingan dalam menjalankan rutinitas dan hubungan *muamalah* dalam berbangsa dan bernegara perlu menjadikan pedoman sesuai dengan kaidah peribadatan masing-masing pemeluk keyakinan, dan begitupun Islam di dalamnya.

## 2. Alasan Subyektif

Pembahasan materi ini diangkat penulis dikarenakan masih belum ada yang membahas pemikiran dan kepesertaan masyarakat Muslim pada konteks kehidupan di tengah masyarakat non-muslim pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Oleh sebab itu permasalahan ini perlu diangkat, disamping ketersediaan literatur serta konteks yang sesuai dengan konsentrasi penulis dalam menyelesaikan penulisan ilmiah ini.

## C. Latar Belakang Masalah

Salah satu persoalan yang selalu menarik untuk dikaji dalam Islam adalah perbincangan seputar hubungan agama dengan negara atau sebaliknya negara dengan agama. Meski telah menjadi subjek diskusi selama berabad-abad lamanya, persoalan tersebut tidak pernah terselesaikan secara tuntas dan akan selalu menarik untuk diperbincangkan, karena pada dasarnya Islam adalah satu sistem kepercayaan yang mempunyai kaitan yang erat dengan politik. Agama dan negara merupakan dua institusi yang sama-sama kuat berpengaruh terhadap kehidupan umat manusia.



Demi agama seseorang rela mengorbankan jiwa dan raganya dan sama halnya ketika berbicara tentang Negara, maka tidak jarang pula seseorang tidak berkeberatan mengorbankan jiwa dan raganya. Konsep *syahid* dalam ajaran Islam dan konsep pahlawan yang berkaitan dengan negara adalah cermin betapa dua institusi tersebut sama-sama mempunyai pengaruh yang demikian besar terhadap kehidupan umat manusia<sup>5</sup>.

Sehubungan dengan permasalahan di atas, pada dasarnya term “negara” sendiri merupakan istilah dari bahasa Indonesia yang mempunyai beberapa arti. *Pertama*, organisasi disuatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. *Kedua*, kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisir di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya<sup>6</sup>.

Namun bukan hal tersebut yang hendak diteladani dalam membangun dan membentuk mentalitas hati Muslim. Ketika hidup berdampingan dengan menyamakan persepsi dan satu tujuan menjadi kepentingan bersama adalah sebuah kosep bahwasanya Islam mengakomodir segala kemaslahatan bagi seluruh alam. Keinginan tersebut sudah mendeskripsikan bahwa Islam yang *rahmatan lil a'lam* menjadi konsepsi dalam membangun segala fungsi dan sendi kehidupan *syariat* Islam secara menyeluruh.

---

<sup>5</sup> Ahmad A. Sofyan & M. Raoychan Madjid. *Gagasan Cak Nur tentang Negara dan Islam*(Yogyakarta: Titian Press, 2003), h. 12

<sup>6</sup> Lihat Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamental*, dalam Tim, *Kamus*, h. 685

Kemudian bila menyinggung sebuah gagasan siapa yang akan menjadi *leader* atau pemimpin, ialah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk turut serta bersamanya di dalam mencapai tujuan dan kepentingan bersama<sup>7</sup>. Melihat dan mengerti segala sub-sub bagian sendi terkecil dalam kehidupan bermasyarakat, merupakan salah satu kunci keberhasilan dan kesuksesan seorang pemimpin. Namun dalam konsep Islam, kaitanya erat dengan pemimpin ialah keimanan dan aqidah dalam menegakkan *syariat* Islam sebagai dasar menjalankan roda pemerintahan.

Sukses tidaknya sebuah kelompok masyarakat sangat tergantung pada kemampuan pemimpin (*leader*) di dalam menggerakkan seluruh anggota untuk mencapai tujuan. Pemimpin merupakan manusia pilihan yang jumlahnya sedikit, namun perannya dalam masyarakat merupakan penentu keberhasilan dan suksesnya tujuan yang hendak dicapai. Walaupun bukan satu-satunya ukuran keberhasilan, akan tetapi kenyataan membuktikan bahwa tanpa kehadiran pemimpin, suatu kelompok masyarakat akan statis dan cenderung berjalan tanpa arah. Keharusan untuk memilih pemimpin diatur dalam Undang-undang Dasar (UUD) tahun 1945 pada Pasal 6 ayat 1 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat

---

<sup>7</sup> Sobry Sutikno, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Lombok: Holistica, 2014), h. 9

melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada<sup>8</sup>.

Berdasarkan peraturan tersebut, sangat jelas bahwasanya setiap warga negara memiliki hak untuk dipilih sebagai pemimpin atau memilih pemimpin. Baik hal tersebut dalam wilayah Republik Indonesia (Presiden/ Wakil Presiden) maupun suatu daerah baik Provinsi (Gubernur/ Wakil Gubernur), Kabupaten/ Kota (Bupati/ Walikota) tanpa membedakan agama atau keyakinan yang dianutnya. Asas inilah yang dijunjung dalam melakukan sebuah proses demokrasi sebagai alat penentu yang dianggap layak untuk menjadi seorang pemimpin dikalangannya.

Yusuf Qaradhawi ternyata telah mempunyai konsep pandangannya dan pemikiran mengenai partisipasi politik Seorang Muslim dalam pemerintahan non-Muslim juga menyadari bahwasanya penerapan demokrasi memerlukan stamina yang kuat dari seluruh kalangan masyarakat yang bernaung di bawah kepemimpinan negara. Sebab penerapan demokrasi tentunya melahirkan tantangan yang sangat besar, dikarenakan demokrasi bukanlah masalah yang gampang dan bukanlah suatu perpindahan dari tahapan ketahapan lainnya, melainkan suatu kelahiran baru dan sudah tentu, kelahiran yang susah payah<sup>9</sup>”. Artinya pergerakan sebuah negara yang dilakukan oleh segala unsur masyarakat di dalam menjalankan sistematika bernegara, menjadi sebuah keharusan dan kebutuhan dalam tata letak dan pelaksana bernegara.

<sup>8</sup> Tim Sinar Grafika, *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 41

<sup>9</sup> Lihat juga, Muhammad Ābid al-Jābiri, *Al-Dimuqratiyyah*, terj. *Mujiburrohman* , (Yogyakarta: LKiS, 2003), h. 39-40

Berdasarkan paparan di atas, menelusuri gagasan tentang konsep-konsep negara yang diungkapkan oleh Yusuf Qaradhawi memiliki keunikan tersendiri dengan beberapa tokoh pada kalangan lainnya yang membahas akan eksistensi sebuah pergerakan dan perjalanan sebuah negara. Oleh sebab itu, menjadi menarik untuk dieksplorasi lebih jauh. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa pengaruh stemen tersebut sangat besar terhadap dunia pemikiran Islam. Meskipun berbagai pemikiran ini berasal dari zaman yang berbeda. Penulis mencoba untuk menarasikan dan mengungkap pemikiran seorang tokoh Yusuf Qardhawi yang banyak menyatakan sebuah eksistensi Tuhan atas sebuah pemikiran atau membangun landasan dan pondasi bernegara yang beliau ungkapkan, serta partisipasinya masyarakat muslim dalam urusan di dalam negara dengan mayoritas penduduk non-muslim.

#### **D. Fokus Penelitian**

Substansi dalam melakukan penelitian menjadi sebuah keharusan dan kepastian untuk setiap peneliti menentukan fokus penelitiannya agar tidak melebar dan terjadinya ketidak fokusan. Maka peneliti mengangkat penelitian ini dengan memfokuskan pada sebuah pemikiran Tokoh Muslim Yusuf Qaradhawi mengenai Partisipasi Politik seorang Muslim di dalam Pemerintahan Non-Muslim.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:



1. Bagaimana pemikiran Yusuf Qaradhawi tentang partisipasi politik seorang muslim dalam pemerintahan non-muslim?
2. Dasar-dasar Hukum apa saja yang menjadi argumen Yusuf Qaradhawi Memperbolehkan partisipasi seorang muslim dalam pemerintahan non-muslim?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pandangan dan argumen Yusuf Qaradhawi tentang partisipasi politik seorang muslim dalam pemerintahan non-muslim.
2. Untuk mengetahui lebih jauh relevansi pemikiran Yusuf Qaradhawi tentang Partisipasi politik seorang Muslim dalam konteks ke-Indonesiaan.

#### **G. Signifikan Penelitian**

Adapun signifikansi atau kegunaan penelitian ini adalah untuk menambah khazanah pengetahuan bagi penulis sendiri dan bagi siapa saja yang nantinya membaca skripsi ini. Lebih spesifik dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, manfaat-manfaat tersebut di antaranya adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan Politik dalam Islam, Khususnya tentang pemikiran Yusuf Qaradhawi tentang partisipasi seorang muslim dalam pemerintahan non muslim, ataupun sebagai sumber referensi pada penelitian yang sejenis

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lintas agama yang hidup berdampingan terutama dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah individual *Life history* (studi tokoh) yaitu pengkajian secara sistematis terhadap pemikiran atau gagasan seorang pemikir muslim, keseluruhannya atau sebahagiannya. Studi tokoh pada umumnya bertujuan untuk mencapai suatu pemahaman tentang ketokohan seorang individu dalam suatu komunitas tertentu, melalui pandangan-pandangannya<sup>10</sup>.

Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan adalah konten analisis atau dengan nama lain *library research* (kepuustakaan). Dan jenis penelitian kualitatif dengan metode *library reseach*, yaitu penelitian yang dilakukan melalui *Iliterature* kepuustakaan sebagai sumber tertulis, baik berupa kitab, catatan maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu<sup>11</sup>. Alasan menggunakan metode *Library Research* (Kepustakaan) adalah karena peneliti berusaha memahami pemikiran dan gagasan yang dituangkan dalam karya ataupun pendapat yang berkaitan dengan eksistensi masyarakat muslim di dalam kesertaannya pada sebuah

<sup>10</sup> Syahrin Harapan, *Metodologi Studi Tokoh dan Penulisan Biografi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), Cet-II, h. 6

<sup>11</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), Cet. 1, h. 11

kehidupan politik dalam sebuah negara. Kemudian sebagai bahan di dalam mengumpulkan secara keseluruhan data yang akan digali, maka berikutnya dilakukanlah sebuah dianalisa yang berangkat dari sumber-sumber buku-buku ataupun tulisan yang bertebaran diberbagai media, baik cetak maupun elektronik. Adapun data-data tersebut tidak terbatas hanya pada tulisan tokoh yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini (Yusuf Qaradhawi), tetapi juga melibatkan tulisan-tulisan orang lain yang mempunyai kaitan dengan apa yang sedang diteliti.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan filosofis dan pendekatan ilmu politik. Pendekatan filosofis bertujuan untuk mencari tilikan-tilikan baru (*new insights*) terkait dengan berbagai konsep-konsep penting yang berhubungan dengan Negara. Dilain sisi pendekatan ilmu politik bertujuan untuk menemukan relevansi pemikiran dari tokoh tersebut dengan mengaitkannya dalam konteks keindonesiaan.

## 2. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, tahapan pengumpulan data-data merupakan sebuah tahap yang terpenting dalam menjawab tujuan sebuah penelitian. Kemudian data ialah sebuah informasi yang penting dan terkait dengan pemenuhan dan keutuhan data-data yang hendak diangkat dengan kenyataan data yang empiris, kemudian data-data tersebut yang akan terkumpul merupakan data yang dapat bersifat ukuran angka-angka

(kuantitatif) ataupun sebuah data dengan ukuran kata-kata (kualitatif) baik tulisan maupun lisan<sup>12</sup>.

Sebagai sebuah proses di dalam pengumpulan data, maka dirasa penelitian tersebut dapat dilakukan dengan melakukan sebuah proses pengumpulan data-data yang dirasa cukup menunjang kepemenuhan informasi data yang diharapkan. Menurut Cik Hasan Basri, dalam penelitian dikenal dua macam data yaitu data primer dan data sekunder<sup>13</sup>. Maka yang termasuk data primer dan sekunder ialah;

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data atau informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data<sup>14</sup>. Kemudian yang termasuk di dalam data primer dalam penelitian ini ialah Al-Qur'an dan Hadist atau buku-buku, terjemahan dan ada pula media cetak yang dikarang oleh Yusuf Qardhawi yang menjurus pada pembahasan partisipasi atau hubungan antara Muslim dan non-muslim baik dalam bidang politik ataupun *muamalah* masyarakat muslim. Di antaranya seperti "*Ghoirul Muslimin Fil Mujtama' al-Islami* (Minoritas Non-Muslim di Dalam Masyarakat Islam)"

<sup>12</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2014), Cet. 4, h. 50

<sup>13</sup> Cik Hasan Basri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi (bidang ilmu agama Islam)*, (Jakarta: Logos, 1998), h. 59. Lihat Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 91 dan Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 30. Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 119

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 3



#### b. Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini ialah “*terj. Fatwa-Fatwa Kontemporer* karya Yusuf Qaradhawi”, “*Awlawiyyat al-Harakat al-Islamiyah Fi al-Marhalah al-Qadimah* (Terj. A.Najiyulloh dengan judul “Prioritas Gerakan Islam”)", “*Ghoirul Muslimin Fil Mujtama’ al-Islami* (Terj. Muhammad al-Baqir dengan judul “Minoritas Non.Muslim di Dalam Masyarakat Islam”)", Fatwa Seyikh Dr. Yusuf Qaradhawi tentang Hukum Berdamai dengan Yahudi (Israel), Fiqh Al-Awlawiyat, dan Fiqah Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian karya Yusuf Qaradhawi lainnya yang berjudul *Fiqh Negara, Ijtihad Baru Seputar Sistem Demokrasi, Multipartai, Keterlibatan wanita Didewan Perwakilan Partisipasi Dalam Pemerintahan Sekuler*, terjemahan Syafril Halim, cet. I (Jakarta: Rabbani Press, 1997).

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data<sup>15</sup>. Teknik pengumpulan data juga didefinisikan sebagai cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian<sup>16</sup>. Dalam penjelasan yang telah dijabarkan jelas bahwasanya sebuah teknik pengumpulan data ialah merupakan langkah

<sup>15</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Penerbit CV Alfabet, 2010), h. 91

<sup>16</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, h. 138. Lihat Muhammad Nazir, (*Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), Cet. 6, h. 174

## BAB IV

### ANALISIS DATA

#### A. Pendapat Yusuf Qaradhawi Tentang Partisipasi Seorang Muslim dalam Pemerintahan Non-Muslim

Berdasarkan Pendapat Al-Qaradhawi tentang Partisipasi Seorang Muslim dalam Pemerintahan Muslim menyebutkan bahwa berdirinya sebuah negara dimulai dari adanya keyakinan akan kebenaran Islam sebagai sistem kehidupan yang lengkap termasuk di dalamnya kehidupan politik dan hukum. Adanya keyakinan dari rakyat inilah selanjutnya yang direalisasikan secara konkret untuk menjadikannya sebagai pengaturan pemerintahan, sehingga memungkinkan untuk membentuk *daulah* atau negara<sup>1</sup>. Namun, apabila hal tersebut amat sukar untuk dicapai dengan berbagai alasan-alasan yang memaksa, maka demi kemaslahatan kaum Muslim diperbolehkan untuk bergabung dengan yang lain dan menerima kekuasaan yang ada.

Prinsip dasar Islam dalam pengaturan kehidupan publik bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan kesejahteraan rakyat secara umum. Dalam kaidah *ushul fikih* telah disebutkan bahwa tujuan substantiv universal disyariatkannya hukum-hukum agama (*syariat*) adalah untuk menjamin hak-hak dasar manusia yang meliputi: keselamatan beragama (*hifz al-din*), keselamatan jiwa dan raga (*hifz al-nafs*), keselamatan keluarga atau keturunan (*hifz al-nasl*), keselamatan harta benda (*hifz al-mal*), keselamatan akal (*hifz al-'aql*).

Usaha al-Qaradhawi untuk memberikan *ahl adz-dzimmah* hak yang semestinya mereka dapatkan, sangat sesuai dengan konsep yang tertuang didalam sebuah perjanjian yang lahir ketika Nabi Muhammad memimpin umat Islam pada masanya yaitu yang disebut “*shohifah madinah*” atau “piagam madinah” yang menyatakan bahwa mereka mendapatkan hak perlindungan. Perlindungan ini sangat jelas tertulis dalam Piagam Madinah. Dalam pasal 15 disebutkan “Jaminan Allah satu. Jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang dekat”<sup>2</sup>. Dalam piagam ini, dinyatakan bahwa setiap orang yang berada di Madinah mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan perlindungan, meskipun berbeda latar belakang agama dan suku.

Yusuf Qaradhawi juga mengungkapkan bahwasanya kepersertaan Muslim dalam pemerintahan non-muslim diberikan titik kuat dalam bentuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruhnya, maka kepemimpinan no-muslim dalam pemerintahan harus ditaati. Diberikan keluasaan dan hak-haknya dengan tidak mengabaikan kewajibannya sebagai warga Negara. Diberikan hak membangun tempat ibadah dan menjalankan syariat agamanya serta melakukan rutinitas agamanya seperti biasanya dengan tidak menyakiti hati umat muslim. Dengan kondisi sebaliknya, Muslim diperintahkan taat pada kepemimpinan mayoritas dalam pemerintahan non-Muslim dengan pemerintahan tersebut mengakomodir kebutuhan Muslim

Dapat disimpulkan bahwa toleransi terhadap para penganut agama lain, seperti dipraktekkan oleh kaum Muslimin yang hidup mereka sepenuhnya

berlandaskan agama dan disaat mereka telah meraih kemenangan dan kekuasaan sempurna, adalah sesuatu yang belum pernah dikenal dalam sejarah agama-agama lain.

## **B. Dasar-Dasar Hukum Yusuf Qaradhawi Memperbolehkan Seorang Muslim Berpatasipasi dalam Pemerintahan Non-Muslim**

Hubungan harmonis adalah merupakan sebuah cita-cita yang diidamkan dalam hidup berdampingan dengan satu atau berlainan keyakinan dan keimanan. Karena hal ini didasari atas rasa interpretasi nilai-nilai Islam yang *rahmatan lil a'alam*. Konteks ini dalam ajaran agama Islam menjadi sebuah kunci jawaban dalam hidup dalam segala lini untuk bersama dan berdampingan. Tak ubahnya ketika pemikiran tersebut terakomodir dalam sebuah wadah yang dimana ulama dapat menjelaskan secara ringkas dan rinci terkait berbagai syariat ajaran agama Islam. Karena setiap ulama mempunyai metode tersendiri dalam memahami teks Al-qur'an dan hadis. Itulah salah satu penyebab banyak ditemukannya perbedaan pendapat antara ulama yang satu dengan yang lain. Al-Qur'an dan hadis merupakan sumber hukum dan panutan umat Islam dalam menyikapi permasalahan-permasalahan umat Muslim, baik hubungan antara sesama Muslim atau dengan non-muslim. Pola, model dan corak yang dijelaskan Qardhawi dalam pemikirannya selama ini ialah dengan menjadikan sebuah posisi poros tengah untuk merangkul dan menjembatani ketegangan atas dasar pemikiran yang saling bersebrangan. Ciri yang dijabarkan dalam pemikiran Qaradhawi seperti;



1. Menjauhi Kejumudan dalam Memahami Teks Al-Qur'an dan Hadis, Sekaligus tidak Terlalu Bebas dalam Memahaminya.

Al-Qaardhawi merupakan salah satu ulama Muslim yang pemikirannya memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perkembangan umat Islam. Pemikirannya bisa diterima oleh kebanyakan umat Muslim karena pemikirannya selalu mengedepankan kemaslahatan, menajuhi *kejumudan* dalam berpikir, serta selalu berpegang dengan teks Al-quran dan hadis. Al-Qaradhawi juga selalu berusaha mencari jalan tengah dalam memahami teks Al-quran dan hadis. Al-Qaradhawi tidak terpaku dengan teks Al-quran dan hadis seperti kebanyakan ulama konserpatif, namun juga tidak berlebihan dalam memahami konteks Al-quran dan hadis sebagaimana yang sering dilakukan oleh para pemikir liberal, sehingga pendapatnya selalu berada di tengah-tengah yang sering disebut dengan istilah “*at-tayyar al-washatiah*.”

2. Berpegang Pada Ulama Terdahulu

Al-Qaradhawi selalu mengutamakan *maslahat* dalam pendapatnya meskipun harus berbenturan dengan pendapat jumhur ulama, namun al-Qaradhawi masih bisa mempertanggung jawabkan pendapatnya dan tetap berusaha mengambil pendapat salah satu dari ulama terdahulu. Ketika jumhur ulama berpendapat bahwa orang Islam yang membunuh orang kafir (baik *harbi* atau *dzimmi*) tidak boleh *diqishah* (dihukum mati), ia cuma diwajibkan bayar *diat*. Al-qaradhawi mempunyai pendapat lain, menurutnya yang tidak boleh dihukum mati dalam masalah ini adalah

orang yang membunuh kafir *harbi*, sedangkan orang yang membunuh kafir *zdimmi* diperbolehkan untuk dihukum mati. Meskipun berbeda dengan pendapat *jumhur* ulama, al-Qaradhawi mengatakan bahwa pendapat ini juga pernah dibawa oleh Abu Hanifah.

### 3. Menolak Pemikiran Barat

Al-Qardhawi selalu mengutamakan *maslahat* dalam pendapatnya meskipun harus berbenturan dengan pendapat *jumhur* ulama, namun al-Qaradhawi masih bisa mempertanggung jawabkan pendapatnya dan tetap berusaha mengambil pendapat salah satu dari ulama terdahulu. Ketika *jumhur* ulama berpendapat bahwa orang Islam yang membunuh orang kafir (baik *harbi* atau *dzimmi*) tidak boleh *digishah* (dihukum mati), ia cuma diwajibkan bayar *diat*. Al-qaradhawi mempunyai pendapat lain, menurutnya yang tidak boleh dihukum mati dalam masalah ini adalah orang yang membunuh kafir *harbi*, sedangkan orang yang membunuh kafir *zdimmi* diperbolehkan untuk dihukum mati. Meskipun berbeda dengan pendapat *jumhur* ulama, al-Qardhawi mengatakan bahwa pendapat ini juga pernah dibawa oleh Abu Hanifah.

### 4. Fokus Terhadap Fikih Prioritas

Al-Qaradhawi menitik beratkan kajian fikih prioritas ini pada urutan amal yang semestinya diutamakan atau didahulukan. Sehingga sesuatu yang tidak penting, tidak didahulukan atas sesuatu yang penting. Sesuatu yang penting tidak didahulukan atas sesuatu yang lebih penting. Sesuatu yang tidak kuat (*marjuh*) tidak didahulukan atas sesuatu yang kuat (*rajih*).

Dan sesuatu "yang biasa-biasa" saja tidak didahulukan atas sesuatu yang utama, atau yang paling utama. Sesuatu yang semestinya didahulukan harus didahulukan, dan yang semestinya diakhirkan harus diakhirkan. Sesuatu yang kecil tidak perlu dibesarkan, dan sesuatu yang penting tidak boleh diabaikan. Setiap perkara mesti diletakkan ditempatnya dengan seimbang dan lurus, tidak lebih dan tidak kurang.

##### 5. Kemaslahatan Hal Utama dari Pada Jumhur Ulama

Al-Qaradhawi merupakan ulama yang bergelut dalam menyikapi permasalahan-permasalahan umat yang muncul dizaman sekarang. Kemaslahatan dimasa sekarang menurutnya lebih penting dari pada mengikuti kebanyakan pendapat ulama terdahulu. Ketika sebuah pembahasan yang dimasa lalu hampir seluruh ulama sepakat, namun ketika dimasa sekarang menurutnya tidak relevan lagi, maka al-Qaradhawi akan mengambil pendapat salah satu ulama yang berbeda dengan kebanyakan ulama lainnya, asalkan pendapat tersebut menurutnya sesuai untuk jaman sekarang. Ini terlihat jelas ketika al-Qaradhawi mengambil pendapat sebagian ulama Hanafiah dalam kasus pembunuhan kafir *dzimmi*. Salah satu bukti bahwa al-Qaradhawi akan mengenyampingkan pendapat kebanyakan ulama, apabila menurutnya sudah tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, yaitu pendapatnya tentang hadis.

Dari hal di atas Penulis sependapat dengan kerangka berfikir Yusuf Qaradhawi di dalam interpretasi nilai-nilai Syariat Islam, yang menilik

beratkan pada permasalahan Umat dan menghindari kejumudan berfikir berlandaskan teks-teks Al-Qur'an dan al-Hadist sebagai dasarnya.

Alasannya karena Penulis rasa main set yang di pakai oleh Yusuf al-Qaradhawi di dalam keterbukaan berfikirnya dirasa mampu untuk mengakomdir permasalahan-permasalahan umat yang selalu dinamis tanpa meninggalkan nilai-nilai Al-Quran dan sunnah sebagai landasannya, namun demikian, perbedaan Geo-politik yang berbeda dan berlaku di Indonesia memberikan tantangan tersendiri di dalam perlaksanaannya, karena adanya dominasi masyarakat Muslim.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan Pembahasan diatas maka yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pandangan Yusuf Qaradhawi tentang Partisipasi Politik seorang Muslim dalam Pemerintahan Non Muslim berpandangan bahwa kehadiran seorang Muslim harus dilaksanakan dalam bingkai tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat sebagai pelaksanaan dari ketaatan kepada Pemimpin atau Uliamri
2. Dasar-dasar Hukum Yusuf Qaradhawi Memperbolehkan Partisipasi Politik Seorang Muslim dalam Pemerintahan Non Muslim. didasari atas rasa interpretasi nilai-nilai Islam yang *rahmatan lil a'alamin*, setiap perkara mesti diletakkan ditempatnya dengan seimbang dan lurus, tidak lebih dan tidak kurang.

#### **B. Rekomendasi**

Berdasarkan beberapa uraian yang penulis dapatkan dari hasil temuan-temuan dalam penelitian ini yang terkait dengan pembahasan partisipasi masyarakat muslim dalam kepemimpinan non-muslim. Maka dalam hal ini penulis memberikan saran, sebagai berikut;

1. Sebagai negara (Indonesia) yang memiliki masyarakat yang kompleks, dan sebagai masyarakat muslim yang menerapkan konsep Islam yang indah, ramah, damai dengan mengamalkan Islam *rahmatan lil a'alamin*

merupakan sebuah kewajiban bagi kita masyarakat luas untuk saling menjaga satu dengan lainnya. saling menghormati dengan berpedoman ajaran dan kepercayaan ajaran agama masing-masing. perbedaan menjadikan sebuah pelajaran dan hikmah bagi kehidupan bersama, dan bukan malah menjadi sebuah pemicu perdebatan, perpecahan dan perselisihan yang sama-sama tidak memiliki rasa saling menghormati satu dengan lainnya.

2. Sebagai kampus (UIN Raden Intan Lampung) yang notabene selevel Universitas harus mampu menampung berbagai perbedaan yang ada, termasuk dalam toleransi beragama dan toleransi perbedaan yang ada, seperti perbedaan ideologi. Kampus seharusnya mampu untuk merangkul semua kepentingan warga kampusnya dan sudah selayaknya bahwa kampus harus merdeka dari cengkraman ideologi pragmatis sempit. Maka pandangan yang dituangkan oleh Yusuf Qaradhawi dirasa sangat cocok apabila diterapkan dan diaplikasikan dalam kehidupan kampus UIN Raden Intan Lampung masa sekarang. Pola pemikiran yang mengutamakan persatuan dan kesatuan dirasa sangat baik untuk dijadikan sebuah acuan dan refrensi. Karena di dalam Islam pun diajarkan yang namanya saling menghormati dan menghargai dengan perbedaan. Toleransi menjadi sebuah acuan dengan menghormati perbedaan, serta dalam konteks masyarakat plural bukan konsep itu yang menjadi sebuah rujukan dan acuan pada masa sekarang.

3. Sebagai masyarakat Muslim dan intelektual Muslim jangan lantas

memberikan sebuah kajian legitimasi terhadap perbedaan itu merupakan sebuah kajian yang harus dihindari. Akan tetapi penggiringan opini kebersamaan dan maslahat menjadi tujuan yang mulia. Bersikap dinamis mengikuti perkembangan akan lebih mudah ketimbang menjadi sebuah sistem yang statis dalam menyikapi partisipasi dalam keadaan digawangi oleh non-muslim.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud, Sunan Abi Daud, edisi Siddiqiy M Jamil, Hadits nomor 2608 dan 2609; kitabal-jihad, Bab *Fi al-qawmi* Yusuf Firuna Yu'ammirunna Ah adahum hadis dari 'Aliy ibn Bahri ibn Barriy dari Hatim Ibn Ismail dari M Ibn Ajlam dari Nafi dari Abi Salmah dari Abi Sai'd al-Khudriy dari Abi Sai'd abu Hurairah, Beirut: Dal al-Fikr, 1994
- A, Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2000
- Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Abul A'la Maududi, *The Islamic Law And Constitution*, Terj. Asep Hikmat, "Sistem Politik Islam", Bandung: Mizan, 1990
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*, Mesir: Darul Hadis, 2005
- Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Abdual Aziz Dahlan, dkk., ed, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002
- Abul A'la Maududi, *The Islamic Law And Constitution*, Terj. Asep Hikmat, "Sistem Politik Islam", Bandung: Mizan, 1990
- Adian Husaini, *Pluralisme Agama, Musuh-Musuh Agama*, Jakarta: Dewan Da'wah Islamiah Indonesia, 2010
- Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2012
- Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, Yogyakarta: UII Pres, 2000
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990
- A. Hasjmy, *Di Mana Letaknya Negara Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984
- Ahmad A. Sofyan & M. Raoychan Madjid, *Gagasan Cak Nur tentang Negara dan Islam*, Yogyakarta: Titian Press, 2003
- Ahmad Baso, *Problem Islam dan Politik: Perspektif "Kritik Nalar Politik"*, M Abid Al-Jabiri, Jakarta: Tashwirul Afkar, 1999
- Ahmad Imron, "Agama dan Negara dalam Pemikiran Arab Kontemporer; Studi atas Pemikiran Politik Muhammad 'Ābid al-Jabiri", dalam *Skipsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003
- Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1977

- Al-Munifi, "The Islamic Constitutional Theory," dalam Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam (Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam)*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995
- Al-San'any, *Subul al-Salam*, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950
- Arief Budiman, *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Jakarta: Gramedia, 1996
- Armaidly A'rmawi, *Pemikiran Filosofis Hubungan Agama dan Negara di Indonesia*, Desertasi tidak diterbitkan, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2009
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali, 2015
- Cik Hasan Basri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi (bidang ilmu agama Islam)*, Jakarta: Logos, 1998
- Etiko Asih Pratiwi, "Pemikiran Politik Kenegaraan Ibnu Taimiyah", dalam *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1997
- Farid, *Formulasi Nuansa Religius Bangsa dalam Praktek Penyelenggaraan Negara* Yogyakarta: Jurnal Filsafat, 1994
- Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I, Jakarta: UI Press, 1985
- Hasan al-Banna, *Majmu'ah Rasa'il al-Imam Syahid Hasan al-Banna*, alih bahasa, Su'adi Sa'ad, "Konsep Pembaruan Masyarakat Islam", Jakarta: Media Da'wah, 1986
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Islam & Politik Bernegara*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002
- Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syari'yyah: Pedoman Islam Bernegara*, Alih Bahasa Firdaus A.N, Jakarta: Bulan Bintang, 1989
- Ismail Ibnu Muhammad, *Hukum Membangun Gereja dan Tempat-tempat Kesyirikan di Negara Muslim*, terjemah; Muhammad Iqbal Ghazali Islam Hous, 1988
- Imam as-Syuthi, *al-Jami' as-Shaghir*, juz 2, Surabaya: Maktabah Hidayah
- Ismail Suny, *Pembagian Kekuasaan Negara*, Jakarta: Aksara Baru, 2004
- J, Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2014
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Lihat Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005
- John L. Esposito, *Islam dan Politik*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990
- Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamental*, Magelang: Yayasan Indonesia Tera Anggota IKAPI, 2001



- Karen Armstrong, *Muhammad Biografi Sang Nabi*, Terj. Joko Sudaryanto, Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2004
- Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995
- Khamami Zada dan Arief R Arofah, *Diskursus Politik Islam*, Jakarta: LSIP 2004
- Khozin Abu Faqih, *Haruskah Dakwah Merambah Kekuasaan?*, Jakarta Timur: Al-I'tishom, 2009
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010
- Marzuki Wahid & Rumaiddi, *"Fiqh Madzhab Negara"*, Kritik Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia, Yogyakarta: LKiS, 2001
- Maulana Muhammad Ali, *Islamologi, Dinul Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1976
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004
- Mohammad Arkoun, *Rethinking Islam*, Terj. Yudian W. Asmin, Lathiful Khuluq, Yogyakarta: LPMI bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1996
- Moh. Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum tata Negara Indonesia, 1983
- Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993
- Mohammed S. Elwa, *Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam*, Terj. Anshori Thayib, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008
- Muhammad Ābid al-Jābirī, *Agama, Negara dan Penerapan Syari'ah*, terj. Mujiburrahman Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001
- Muhammad Ābid al-Jābirī, *Al-Dimuqratiyyah*, terj. Mujiburrohman, Yogyakarta: LKiS, 2003
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Prenada Media, 2003
- Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Fiqh Politik Hasan al-Banna*, Terj. Odie al-Faeda, Solo: Media Insani, 2003
- Muhammad Fu'ad Abd al-Baqiy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-Karim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981
- Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, Terj. Ali Audah, cet. ke-29, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2003
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media, Pratama, 2007

- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Muhammad Syafi'i Antonio dan Tim Tazkia, "*Enseklopedi Leadership & Manajemen Muhammad S.A.W*" *The Super Leader Super Menager*". *Kepemimpinan sosial dan politik, Social & political Leadership*. Jakarta: Tazkia Publishing
- Majid Ibnu Shalih, *Dauru Ahlu ad-Dzimmah fî Iqshâi as-Syari'ah*, Mesir; Darul Huda an-Nabawi, 2007
- Muchsin, *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: IBLAM, Cet 1, 2004
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. 1, 2002
- Munawir Sjadzali *Islam dan Tata negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, UI Press, 1990
- M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep- Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 2002
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2006
- Nicolas P. Aghnides, *The Background Introduction To Muhammedan Law*, New York: Published by The Ab. "Sitti Sjamsijah" Publishing Coy Solo, Java, with the authority-license of Columbia University Press, t.t
- Osman Raliby, *Ibnu Khaldun tentang Masyarakat dan Negara*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989
- Pius A Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Penerbit Arkola, 1994
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Grasindo, 1999
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid III, Beirut: Darul Kutubil 'Arabi, *Terj. Akidah Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1970
- Shobi Mahmassani, *Falsafah al-Tasyri fî al-Islam*, Terj. Ahmad Sudjono, "*Filsafat Hukum dalam Islam*", Bandung: PT Al-Ma'arif, 1976
- Sirajuddin, *Politik Ketatanegaraan Islam Studi Pemikiran A. Hasjmy*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2007
- Sobry Sutikno, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Lombok: Holistica, 2014
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1998
- Sri Soemantri, *Sistem-sistem Pemerintahan Negara-Negara Asean*, Bandung: Tarsito, 1976
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Penerbit CV Alfabet, 2010
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. 12

- Surwandono, 2001, *Pemikiran Politik Islam*, Yogyakarta: LPPI UMY, 2002
- Syahrin Harapan, *Metodologi Studi Tokoh dan Penulisan Biografi*, Jakarta: Prenada Media Group, Cet-II, 2014
- Tim Sinar Grafika, *undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001
- Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Indonesia: Dasar-Dasarnya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983
- W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, Cet. 5, 1976
- Yusuf Al-qardhawi, *Kaifa Natâmal ma'a al-Quran*, Libanon: Darusyuruk, 2000
- Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Negara, Ijtihad Baru Seputar Sistem Demokrasi, Multipartai, Keterlibatan wanita Di dewan Perwakilan Partisipasi Dalam Pemerintahan Sekuler*, trj. Syafril Halim, cet. I Jakarta: Rabbani Press, 1997
- Yusuf Al-qardhawi, *Kaifa Natâmal ma'a as-Sunnah*. Kairo: Bank at-Takwa, 1981
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqhu al-Awlawiyât, Dirâsah Jadîdah fî Dhaui al-Qur'an wa as-Sunnah*, Kairo:Maktabah Wahbah, 1986
- Yusuf al-Qaradhawi, *as-Sunnah Masdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadarah*, Libanon: Dar as-syuruk, 2005
- Yusuf al-Qaradhawi, *al-Islam wa al-Imaniyah, Wajhan Li Wajhin*, Kairo; Maktabah Wahbah
- Zulham Nur, *Negara dalam Pemikiran Muhammad Adib al-Jabiri*, dalam Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007

Website..

Cecep Taufikurrohman, (<http://web-iskandar.tripod.com/qardawi.htm>)

Yusuf al-Qardhawi ([www.wikipedia.or.id](http://www.wikipedia.or.id))

Yusuf al-Qardhawi ([www.yusufqardhawi.com](http://www.yusufqardhawi.com))

strategis yang ada di dalam penelitian sebagai langkah menjawab semua rumusan masalah.

Menggunakan model penelitian kualitatif dengan metode *Library Research* maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi yakni mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, buku, surat kabar dan sebagainya<sup>17</sup>. Dengan tehnik ini maka segala bentuk data atau informasi yang terkait dengan data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan Pemikiran Yusuf Qaradhawi dan dilakukan sebuah kajian dengan menggunakan metode analisa data.

#### 4. Analisa Kualitatif

Secara umum, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan uraian dasar. Setelah data-data dikumpul dari berbagai sumber yang ada dan disusun sesuai dengan kebutuhan kemudian diberikan analisa sebagai langkah akhir, maka dalam penganalisaan ini penulis menggunakan beberapa tahap yakni reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan data.

##### a. Reduksi Data

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat

---

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), Cet. 12, h. 206

rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian

b. Penyajian Data

Selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan. Karena penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan.

c. Kesimpulan Data

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.